

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL



LAPORAN EVALUASI PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETJEN WANTANNAS
SEMESTER I TA. 2021

JAKARTA, JULI 2021

EVALUASI PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETJEN WANTANNAS

1. Pendahuluan

- a.** Reformasi Birokrasi (RB) pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) sebagai salah satu lembaga pemerintah telah menerapkan kebijakan RB secara berkelanjutan yang dilaksanakan setiap tahun, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- b.** Penerapan kebijakan RB di lingkungan Setjen Wantannas sangat dibutuhkan guna membentuk budaya kerja yang efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Salah satu area perubahan yang terdapat dalam kebijakan RB Setjen Wantannas adalah area Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- c.** Kebijakan RB pada area Penataan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Setjen Wantannas dilakukan dalam bentuk kegiatan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mendeteksi dan meminimalisir permasalahan keberlakuan peraturan antara lain peraturan tumpang tindih, inkonsistensi, tidak jelas, multitafsir, pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal. Di samping itu guna menanggulangi potensi permasalahan peraturan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan.
- d.** Laporan Evaluasi Penguatan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat secara berkala ini dimaksudkan untuk memantau penerapan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di lingkungan Setjen Wantannas. Dari hasil evaluasi ini akan terlihat gambaran mengenai peraturan perundang-undangan Setjen Wantannas apakah telah sesuai atau tidak dengan kebutuhan hukum organisasi dan perkembangan hukum yang ada. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dilakukan secara internal oleh Sub Bagian Hukum pada Bagian Kepegawaian dan Hukum Biro Umum yang meliputi peraturan tetap diberlakukan, dirubah, dan/atau dicabut.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan penerapan kebijakan Penataan Peraturan Perundang-Undangan meliputi:

- 1) Menjamin kepastian hukum guna kelancaran kinerja organisasi;
- 2) Menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- 3) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
- 4) Meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen Wantannas;

b. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari Penataan Peraturan Perundang-Undangan ini adalah tersusunnya dokumen identifikasi Peraturan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sejak periode tahun 2008 s/d 2021 yang memuat hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan regulasi dan deregulasi.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu penyelenggaraan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program tersebut adalah 1 (satu) tahun.

4. Hasil Identifikasi

a) Produk Hukum

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, produk hukum Setjen Wantannas yang telah terbit sejak periode tahun 2008 s/d 2021 berjumlah total 256 produk hukum, yang terdiri dari 54 Peraturan Sekretaris Jenderal dan 202 Keputusan Sekretaris Jenderal, dengan status sebagai berikut (rincian terlampir):

1). Periode

- a) Tahun 2008 = 1 Keputusan (berlaku)
- b) Tahun 2009 = 1 Keputusan (berlaku)

- c) Tahun 2010 = 1 Keputusan (tidak berlaku)
- d) Tahun 2012 = 1 Peraturan (tidak berlaku), 3 Keputusan (1 berlaku)
- e) Tahun 2013 = 1 Keputusan (berlaku)
- f) Tahun 2014 = 1 Keputusan (berlaku)
- g) Tahun 2015 = 2 Peraturan (berlaku), 1 Keputusan (berlaku)
- h) Tahun 2016 = 12 Peraturan (11 berlaku), 2 Keputusan (1 berlaku)
- i) Tahun 2017 = 2 Peraturan (1 berlaku), 14 Keputusan (1 berlaku)
- j) Tahun 2018 = 5 Peraturan (5 berlaku), 54 Keputusan (1 berlaku)
- k) Tahun 2019 = 13 Peraturan (12 berlaku), 42 Keputusan (10 berlaku)
- l) Tahun 2020 = 16 Peraturan (16 berlaku), 37 Keputusan (29 berlaku)
- m) Tahun 2021 = 3 Peraturan (3 berlaku), 37 Keputusan (31 berlaku)

2). Bidang Pengaturan

- a) Bidang Kepegawaian
- b) Bidang Tata Usaha
- c) Bidang Barang Milik Negara
- d) Bidang Pengawasan Internal
- e) Bidang Keuangan
- f) Bidang Perencanaan
- g) Bidang Tata Kerja

3) Bidang Yang Belum Teregulasi

- a) Bidang Kepegawaian
- b) Bidang Hukum
- c) Bidang Tata Usaha
- d) Bidang Barang Milik Negara
- e) Bidang Persidangan

- f) Bidang Hubungan Masyarakat
- g) Bidang Sistem Informasi
- h) Bidang Pengawasan Internal
- i) Bidang Keuangan
- j) Bidang Perencanaan
- k) Bidang Tata Kerja

b) Program Pembentukan Persetjen Wantannas Tahun 2021

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional maka diadakan Program Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Usul pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal diajukan oleh Pengusul yang secara tugas dan fungsinya membidangi muatan peraturan yang akan diatur dalam Peraturan Sekretariat Jenderal yang diusulkan. Pengusul mengajukan usulan pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober setiap tahunnya. Usulan pembentukan Peraturan diajukan dalam bentuk Nota Dinas kepada Kepala Biro Umum dengan tembusan kepada Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Hukum dengan melampirkan naskah konsepsi yang meliputi:

- a. urgensi dan tujuan pembentukan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur;
- d. jangkauan dan arah pengaturan; dan
- e. naskah dan salinan lunak rancangan awal Peraturan Sekretariat Jenderal.

Terhadap usulan tersebut, Kepala Biro Umum melalui Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Hukum berwenang untuk:

- a. mengembalikan usulan kepada Pengusul untuk dilakukan penyempurnaan; dan
- b. menolak dan mengembalikan usulan kepada Pengusul dengan disertai alasan secara tertulis.

Berdasarkan usulan tersebut, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Hukum menyusun daftar rencana

penyusunan rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan. Dari hasil usulan diperoleh 18 usulan rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal yang dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 46 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021.

c). Pengelolaan JDIH

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk membentuk organisasi JDIH di lingkungannya masing-masing. JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

JDIH memiliki tujuan untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum, dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada medio Agustus 2020 s.d. November 2020, Kegiatan Pembentukan JDIH Setjen Wantannas dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan, yakni:

- 1) Kegiatan Rapat Pembentukan JDIH Setjen Wantannas, bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan dan dipersiapkan untuk membentuk JDIH di lingkungan Setjen Wantannas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020 di ruang rapat NKRI Setjen Wantannas yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum Setjen Wantannas. Dengan mengundang Drs. Yasmon, M.L.S. selaku Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN Kemenkumham sebagai narasumber.
- 2) Kegiatan Bimbingan Teknis dan Integrasi aplikasi ILDIS JDIH, bertujuan untuk memberikan bimbingan tentang teknis pengelolaan JDIH dan pengintegrasian JDIH Setjen Wantannas ke JDIHN. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari bertempat di ruang rapat NKRI Setjen Wantannas, yakni untuk kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 09 November 2020, dengan mengundang Drs. Yasmon, M.L.S dan dan Reinal Saputra, S.H., MH (BPHN) sebagai narasumber. Kemudian untuk kegiatan Integrasi

JDIH dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 dengan mengundang Emalia Suwartika, S.Sos.,M.Si. dan Diden Priya Utama, S.Kom. (BPHN) sebagai narasumber. Adapun Kelompok Hukum Bagian Kepegawaian dan Hukum Setjen Wantannas telah mengirimkan Surat Permohonan Narasumber kepada Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional tertanggal 5 November 2020 untuk kegiatan Rapat Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH dan Pengintegrasian JDIH Setjen Wantannas. Berdasarkan hasil kegiatan Bimbingan Teknis dan Integrasi aplikasi ILDIS JDIH telah diperoleh Dokumen tentang Kinerja Pengelolaan JDIHN berdasarkan Perpres No 33 Tahun 2012 tentang JDIHN. Terkait dengan Sertifikat Integrasi JDIHN rencananya akan diberikan pada saat Rakornas JDIHN pada minggu ke-2 bulan November 2021.

- 3) Kegiatan Sosialisasi JDIH Setjen Wantannas, bertujuan untuk mensosialisasikan fungsi dan manfaat JDIH Setjen Wantannas kepada pegawai di lingkungan Setjen Wantannas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020 bertempat di ruang NKRI Setjen Wantannas, dengan mengundang Drs. Yasmon, M.L.S. selaku Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN Kemenkumham sebagai narasumber.

5. Kesimpulan

Pemanfaatan fungsi hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan positif dalam organisasi adalah sebuah keharusan, pelaksanaan konsepsi *law as a tool of social engineering* sejatinya memerlukan instrumen peraturan-peraturan yang berkualitas, sinkron, dan harmonis. Oleh karenanya, menjadi sangat penting untuk menjamin pelaksanaan proses produksi peraturan yang taat terhadap kaidah dan asas pembentukan peraturan. Peraturan yang berkualitas merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama, yakni terciptanya Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen Wantannas. Kegiatan penataan peraturan perundang-undangan ini tidak berhenti pada tahap identifikasi ini saja, melainkan perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan regulasi dan deregulasi. Untuk regulasi terutama dilakukan terhadap bidang-bidang yang belum tersentuh pengaturan, dan adapun jumlah peraturan yang perlu untuk dilakukan deregulasi adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Sekretaris Jenderal

1) Yang ditetapkan pada tahun 2016 = 2 peraturan

b. Keputusan Sekretaris Jenderal

1) Yang ditetapkan pada tahun 2008 = 1 keputusan

2) Yang ditetapkan pada tahun 2009 = 1 keputusan

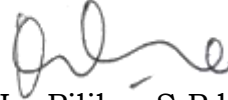
3) Yang ditetapkan pada tahun 2012	=	1 keputusan
4) Yang ditetapkan pada tahun 2016	=	1 keputusan
5) Yang ditetapkan pada tahun 2017	=	1 keputusan
6) Yang ditetapkan pada tahun 2018	=	1 keputusan
7) Yang ditetapkan pada tahun 2019	=	1 keputusan

6. Saran

- a. Setiap unit di lingkungan Setjen Wantannas harus aktif dan tanggap terhadap perubahan serta perkembangan hukum dari luar yang terkait dengan bidang tugasnya, sehingga identifikasi terhadap kebutuhan hukum dapat segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu koordinasi antara unit-unit pengusul dengan Bagian Kepegawaian dan Hukum perlu ditingkatkan.
- b. Mengubah, mencabut, dan/atau menerbitkan peraturan baru terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang telah atau berpotensi memunculkan permasalahan keberlakuan sebagai akibat dari ketidakkonsistenan, duplikasi, multitafsir, maupun karena tidak operasionalnya peraturan. Namun, kami menyarankan agar perubahan, pencabutan, dan/atau penerbitan peraturan baru harus dilakukan dengan komprehensif dan melalui proses perencanaan yang baik.
- c. Melakukan regulasi terhadap bidang-bidang yang perlu diregulasi sebagai berikut:
 - 1) Bidang Kepegawaian
 - 2) Bidang Hukum
 - 3) Bidang Tata Usaha
 - 4) Bidang Barang Milik Negara
 - 5) Bidang Persidangan
 - 6) Bidang Hubungan Masyarakat
 - 7) Bidang Sistem Informasi
 - 8) Bidang Pengawasan Internal
 - 9) Bidang Keuangan
 - 10) Bidang Perencanaan
 - 11) Bidang Tata Kerja

Demikian laporan evaluasi penataan peraturan perundang-undangan Semester I tahun 2021 Setjen Wantannas ini disusun sebagai bahan laporan dan evaluasi dalam rangka menilai efektifitas dan efisensi penataan peraturan perundang-undangan serta memberikan saran perbaikan dan implementasi selanjutnya.

Jakarta, Juli 2021
Ketua Kelompok B Program
Penataan Perundang-Undangan,



Dr. La Piliha, S.Pd., M. Pd
NIP. 197212311993101005

LAMPIRAN I

IDENTIFIKASI PERATURAN SETJEN WANTANNAS PERIODE TAHUN 2012-2021

NO	TAHUN	NOMOR PERSESJEN	JUDUL	TANGGAL DIKELUARKAN/ DITETAPKAN	BERLAKU	KETERANGAN
1	2012	Persesjen No. 87 Tahun 2012	Penyelenggaraan SPIP	18 Desember 2012	X	<ul style="list-style-type: none"> Dinyatakan tidak berlaku Diganti dengan Persesjen No. 13 Tahun 2019
2	2015	Persesjen No. 01 Tahun 2015	Renstra 2015-2019	31 Maret 2015	X	<ul style="list-style-type: none"> Dinyatakan tidak berlaku Diganti dengan Persesjen No. 42 Tahun 2020
3	2015	Persesjen No. 2 Tahun 2015	Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	6 Oktober 2016	X	<ul style="list-style-type: none"> Dinyatakan tidak berlaku Diganti dengan Persesjen No. 68 Tahun 2020
4	2016	Persesjen No. 1 Tahun 2016	Organisasi Pengawasan Internal	25 Mei 2016	√	<ul style="list-style-type: none"> TPI ini sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di lingkungan setjen wantannas perlu diperbaharui agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang ada
5	2016	Persesjen No. 2 Tahun 2016	Tata Laksana Pengawasan Internal	25 Mei 2016	√	-
6	2016	Persesjen No. 4 Tahun 2016	Pedoman Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	26 Mei 2016	√	-
7	2016	Persesjen No. 13 Tahun 2016	Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	30 Agustus 2016	X	<ul style="list-style-type: none"> Dinyatakan tidak berlaku Diganti dengan Persesjen No. 80 Tahun 2020
8	2016	Persesjen No. 14 Tahun 2016	Klasifikasi Arsip	31 Agustus 2016	X	<ul style="list-style-type: none"> Dinyatakan tidak berlaku Diganti dengan Persesjen No. 7 Tahun 2019
9	2016	Persesjen No. 18 Tahun 2016	Pedoman Implementasi Manajemen Risiko Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	September 2016	X	<ul style="list-style-type: none"> Dinyatakan tidak berlaku Diganti dengan Persesjen No. 70 Tahun 2020

10	2016	Persesjen No. 19 Tahun 2016	Pola Karier Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	5 September 2016	√	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dirubah dan disesuaikan dengan PP No. 11 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah oleh PP No. 17 Tahun 2020, Permenpan RB No 21 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS
11	2016	Persesjen No. 20 Tahun 2016	Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	5 September 2016	X	<ul style="list-style-type: none"> • Dinyatakan tidak berlaku • Diganti dengan Persetjen No. 87 Tahun 2020
12	2016	Persesjen No. 21 Tahun 2016	Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	5 September 2016	√	-
13	2016	Persesjen No. 33 Tahun 2016	Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	30 September 2016	X	<ul style="list-style-type: none"> • Dinyatakan tidak berlaku • Diganti dengan Persetjen No. 88 Tahun 2020
14	2016	Persesjen No. 46 Tahun 2016	Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	4 Desember 2016	X	<ul style="list-style-type: none"> • Dinyatakan tidak berlaku • Diganti dengan Persesjen No. 53 Tahun 2020
15	2016	Persesjen No. 48 Tahun 2016	Penyetaraan Peringkat Jabatan/Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	5 Desember 2016	√	-
16	2017	Persesjen No. 1 Tahun 2017	Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	28 Februari 2017	√	-
17	2017	Persesjen No. 2 Tahun 2017	Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	31 Juli 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • Dinyatakan tidak berlaku • Diganti dengan Persesjen No. 8 Tahun 2019
18	2018	Persesjen No. 1 Tahun 2018	Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	8 Februari 2018	√	-
19	2018	Persesjen No. 2 Tahun 2018	Pembagian Tugas Pembuatan Kajian Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	28 Mei 2018	√	-

20	2018	Persesjen No. 5 Tahun 2018	Tata Cara Penanganan Pelaporan WBS	5 Maret 2018	√	-
21	2018	Persesjen No. 6 Tahun 2018	Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi	13 November 2018	√	-
22	2018	Persesjen No. 9 Tahun 2018	JDIH	27 Desember 2018	√	-
23	2019	Persesjen No. 1 Tahun 2019	Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	5 April 2019	√	-
24	2019	Persesjen No. 2 Tahun 2019	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	April 2019	√	<ul style="list-style-type: none"> • Dinyatakan tidak berlaku • Diganti dengan Persesjen No. 3 Tahun 2021
25	2019	Persesjen No. 3 Tahun 2019	Penetapan Lambang dan Pedoman Penggunaan Lencana Bela Negara	3 Mei 2019	√	-
26	2019	Persesjen No. 4 Tahun 2019	Kode Etik Wasint	17 Juni 2019	√	-
27	2019	Persesjen No. 6 Tahun 2019	Standar Sarana dan Prasarana	28 Juni 2019	√	-
28	2019	Persesjen No. 7 Tahun 2019	Klasifikasi Arsip	21 Agustus 2019	√	-
29	2019	Persesjen No. 8 Tahun 2019	Perubahan atas Perses Tunkin No 2 Tahun 2017	28 Agustus 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • Dinyatakan tidak berlaku • Diganti dengan Persesjen No. 5 Tahun 2020
30	2019	Persesjen No. 10 Tahun 2019	Penyelesaian Kerugian Negara	27 September 2019	√	-
31	2019	Persesjen No. 13 Tahun 2019	Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP	30 September 2019	√	-
32	2019	Persesjen No. 15 Tahun 2019	Kamus Kompetensi Teknis	31 Oktober 2019	√	-
33	2019	Persesjen No 17 Tahun 2019	Pedoman Umum Pengawasan Setjen Wantannas	11 November 2019	√	-
34	2019	Persesjen No 18 Tahun 2019	Pedoman Kendali Mutu Audit APIP	11 November 2019	√	-
35	2019	Persesjen No 19 Tahun 2019	Penyusutan Arsip	11 November 2019	√	-
36	2020	Persesjen No 5 Tahun 2020	TUNKIN	27 Januari 2020	√	-
37	2020	Persesjen No 10 Tahun 2020	Pedoman Tata Tulis Produk di Lingkungan Setjen Wantannas	10 Maret 2020	√	-
38	2020	Persesjen No 25 Tahun 2020	IKU TA 2020-2024	31 Maret 2020	√	-
39	2020	Persesjen No 42 Tahun 2020	RENSTRA TA 2020-2024	11 Mei 2020	√	-
40	2020	Persesjen No 43 Tahun 2020	Penanganan Pengaduan Masyarakat	12 Mei 2020	√	-
41	2020	Persesjen No 53 Tahun 2020	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan	10 Juni 2020	√	-
42	2020	Persesjen No 65 Tahun 2020	Penyusunan Laporan Periodik Kegiatan dan Anggaran	19 Juni 2020	√	-
43	2020	Persesjen No 68 Tahun 2020	Road Map RB 2020-2024	22 Juni 2020	√	-
44	2020	Persesjen No 70 Tahun 2020	Pedoman Penerapan Manajemen Risiko	23 Juni 2020	√	-
45	2020	Persesjen No 80 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kerja	24 Juli 2020	√	-

46	2020	Persesjen No 83 Tahun 2020	Reward and Punishment Anggaran	28 Juli 2020	√	-
47	2020	Persesjen No 85 Tahun 2020	Kode Etik Pegawai	30 Juli 2020	√	-
48	2020	Persesjen No 86 Tahun 2020	Manajemen Talenta Pegawai	30 Juli 2020	√	-
49	2020	Persesjen No 87 Tahun 2020	Tata Cara Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif	30 Juli 2020	√	-
50	2020	Persesjen No 88 Tahun 2020	Tata Cara Pembentukan Persetjen dan Kepsesjen	30 Juli 2020	√	-
51	2020	Persetjen No 103 Tahun 2020	Perubahan Atas Petunjuk Evaluasi SAKIP	17 November 2020	√	-
52	2021	Persetjen No 1 Tahun 2021	Penyelenggaraan Tata Kelola SPBE	31 Mei 2021	√	-
53	2021	Persetjen No 2 Tahun 2021	Pedoman Penggunaan Seragam dan Atribut Kerja bagi Pegawai	22 Juni 2021	√	-
54	2021	Persetjen No 3 Tahun 2021	Pengendalian Gratifikasi	1 September 2021	√	-

Lampiran II

IDENTIFIKASI KEPSESJEN SETJEN WANTANNAS PERIODE TAHUN 2008-2021

NO	TAHUN	NOMOR KEPSES	JUDUL	TANGGAL	BERLAKU	KETERANGAN
1	2008	Kepses No 89 Tahun 2008	BAPERJAKAT	25 September 2008	√	<ul style="list-style-type: none"> perlu diperbaharui karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan instansi, serta perlu disesuaikan dengan uu no 5 tahun 2014 dan pp no 11 tahun 2017 yg telah diubah dengan pp no 17 tahun 2020
2	2009	Kepses No 18 Tahun 2009	Lencana Tanda Jabatan	27 Februari 2009	√	<ul style="list-style-type: none"> sudah tidak berlaku sudah diganti dengan Persetjen No 2 tahun 2021
3	2010	Kepses No 41a Tahun 2010	Tata Cara Pelayanan Informasi Publik	21 Mei 2010	X	<ul style="list-style-type: none"> sudah tidak berlaku sudah diganti dengan perses no 06 tahun 2018
4	2012	Kepses No 57 Tahun 2012	Kode Etik Pegawai	27 Juni 2012	X	<ul style="list-style-type: none"> sudah tidak berlaku sudah diganti dengan Persesjen No 85 Tahun 2020
5	2012	Kepses No 69 Tahun 2012	Penetapan Kelas Jabatan	9 Juli 2012	X	<ul style="list-style-type: none"> sudah tidak berlaku sudah diganti dengan perses no 77 tahun 2013

6	2012	Kepres No 86 Tahun 2012	Pedoman Format Tata Tulis Produk	11 Desember 2012	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan perses no 10 tahun 2020
7	2013	Kepres No 84 Tahun 2013	Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP	31 Desember 2013	√	-
8	2014	Kepres No 38 Tahun 2014	SOP Tata Cara Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	16 Mei 2014	√	-
9	2015	Kepres No 90 Tahun 2015	Reward dan Punishment	1 September 2015	√	-
10	2016	Kepres No 118 Tahun 2016	Tim Penyusun Pedoman Kinerja	31 Oktober 2016	√	<ul style="list-style-type: none"> • perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan
11	2016	Kepres No 121 Tahun 2016	Perub Kedua Kepres No 21 Tahun 2016 ttg Tim RB	31 Oktober 2016	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
12	2017	Kepres KPA No 91 Tahun 2017	Paw 3 KPA No 142 Tahun 2016	27 Maret 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
13	2017	Kepres KPA No 189 Tahun 2017	Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	29 Desember 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kep KPA no 59 tahun 2018
14	2017	Kepres No 09 Tahun 2017	Penetapan Unit Kerja yang Dikembangkan Menjadi ZI	12 Januari 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
15	2017	Kepres No 12 Tahun 2017	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	13 Januari 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepres no 34 tahun 2018
16	2017	Kepres No 27 Tahun 2017	Pengelolaan Kinerja	23 Januari 2017	√	<ul style="list-style-type: none"> • perlu diperbaharui karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan instansi, serta perlu disesuaikan dengan pp no 30 tahun 2019
17	2017	Kepres No 37 Tahun 2017	Penunjukan Role Model Pengembangan Budaya Kinerja	2 Februari 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
18	2017	Kepres No 57 Tahun 2017	Perub Kepres No 26 Tahun 2017 ttg Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang	21 Februari 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
19	2017	Kepres No 109 Tahun 2017	Perub Kepres No 36 Tahun 2017 Ttg Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana RB	11 April 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
20	2017	Kepres No 114 Tahun 2017	Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi	1 Mei 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepres no 37 tahun 2019
21	2017	Kepres No 139 Tahun 2017	Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK	17 Juli 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
22	2017	Kepres No 143 Tahun 2017	Penyelenggara Negara di Setjen Wantannas yang Wajib Melaporkan LHKPN	24 Juli 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 64 tahun 2019

23	2017	Kepres No 149 Tahun 2017	Perub Atas Kepres No 49 Tahun 2017 ttg Tim Pengawas Internal	26 Juli 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
24	2017	Kepres No 186 Tahun 2017	Rencana Kinerja Tahunan	28 Desember 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
25	2017	Kepres No 190 Tahun 2017	Penunjukan KPA	29 Desember 2017	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepres no 37 tahun 2018
26	2018	Kepres KPA No 02 Tahun 2018	Pejabat Pengadaan dan PPHP	4 Januari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepres no 45 tahun 2018
27	2018	Kepres KPA No 14 Tahun 2018	Tim Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara	19 Januari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
28	2018	Kepres KPA No 45 Tahun 2018	Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 April 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
29	2018	Kepres KPA No 59 Tahun 2018	Paw Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	17 April 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 131 tahun 2018
30	2018	Kepres KPA No 116 Tahun 2018	Paw 2 Pejabat Pengadaan dan PPHP	13 Juli 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
31	2018	Kepres KPA No 131 Tahun 2018	Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	3 September 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 57 tahun 2019
32	2018	Kepres No 04 Tahun 2018	Tim Pengelola Website Perencanaan	8 Januari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 51 tahun 2018
33	2018	Kepres No 05 Tahun 2018	Tim Pengelola Website Organisasi dan Tata Laksana	8 Januari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 44 tahun 2018
34	2018	Kepres No 07 Tahun 2018	Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	8 Januari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 54 tahun 2018
35	2018	Kepres No 09 Tahun 2018	Tim Penataan Tata Laksana (Business Process)	10 Januari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 43 tahun 2018
36	2018	Kepres No 10 Tahun 2018	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra)	10 Januari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
37	2018	Kepres No 11 Tahun 2018	Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran (Monev)	10 Januari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 56 tahun 2018

38	2018	Kepres No 19 Tahun 2018	Tim Penyusun Perencanaan Pengembangan PNS (P3PNS)	24 Januari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
39	2018	Kepres No 20 Tahun 2018	Tim Penyusunan Peraturan Internal	24 Januari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
40	2018	Kepres No 30 Tahun 2018	Tim Penilai Kinerja PNS	6 Februari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
41	2018	Kepres No 31 Tahun 2018	Tim Pengelola Website Setjen Wantannas	6 Januari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
42	2018	Kepres No 33 Tahun 2018	Tim Penyusunan Majalah dan Buletin	6 Februari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
43	2018	Kepres No 34 Tahun 2018	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	6 Februari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 53 tahun 2018
44	2018	Kepres No 35 Tahun 2018	Tim Penyusutan Arsip	7 Februari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
45	2018	Kepres No 37 Tahun 2018	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	8 Februari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 01 tahun 2020
46	2018	Kepres No 39 Tahun 2018	Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RB	8 Februari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 65 tahun 2018
47	2018	Kepres No 40 Tahun 2018	Tim Pengawasan Internal	23 Februari 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
48	2018	Kepres No 43 Tahun 2018	Paw Tim Penataan Tata Laksana (Business Process)	26 Maret 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 64 tahun 2018
49	2018	Kepres No 44 Tahun 2018	Paw Tim Pengelola Website Organisasi dan Tata Laksana	26 Maret 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 99 tahun 2018
50	2018	Kepres No 49 Tahun 2018	Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Pegawai	6 Maret 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 62 tahun 2018
51	2018	Kepres No 51 Tahun 2018	Paw Tim Pengelola Website Perencanaan	11 April 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 98 tahun 2018
52	2018	Kepres No 53 Tahun 2018	Paw Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	11 April 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepres no 59 tahun 2019
53	2018	Kepres No 54 Tahun 2018	Paw Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	11 April 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn

54	2018	Kepres No 56 Tahun 2018	Paw Tim Monitoring Dan Evaluasi Anggaran (Monev)	11 April 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 135 tahun 2018
55	2018	Kepres No 57 Tahun 2018	Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan	11 April 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 50 tahun 2019
56	2018	Kepres No 62 Tahun 2018	Paw Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Pegawai	24 April 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku (diubah dengan kepres no 139 tahun 2018)
57	2018	Kepres No 64 Tahun 2018	Paw 2 Tim Penataan Tata Laksana (Business Process)	24 April 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 97 tahun 2018
58	2018	Kepres No 65 Tahun 2018	Paw Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RB	24 April 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 100 tahun 2018
59	2018	Kepres No 79 Tahun 2018	Penunjukan Sebagai EO Sarasehan Nasional	8 Juni 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku pada tgl 10-11 Juli 2018
60	2018	Kepres No 97 Tahun 2018	Paw 3 Tim Penataan Tata Laksana (Business Process)	2 Juli 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 136 tahun 2018
61	2018	Kepres No 98 Tahun 2018	Paw 2 Tim Pengelola Website Perencanaan	2 Juli 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
62	2018	Kepres No 99 Tahun 2018	Paw 2 Tim Pengelola Website Organisasi dan Tata Laksana	2 Juli 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 134 tahun 2018
63	2018	Kepres No 100 Tahun 2018	Paw 2 Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RB	2 Juli 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 133 tahun 2018
64	2018	Kepres No 119 Tahun 2019	Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Tahun 2018	Juli 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepres no 06 tahun 2019
65	2018	Kepres No 129 Tahun 2018	Tim Evaluasi Kelembagaan	27 Agustus 2018	√	<ul style="list-style-type: none"> • perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan instansi
67	2018	Kepres No 133 Tahun 2018	Paw 3 Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RB	3 September 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
68	2018	Kepres No 134 Tahun 2018	Paw 3 Tim Pengelola Website Organisasi dan Tata Laksana	3 September 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn

68	2018	Kepres No 134 Tahun 2018	Paw 3 Tim Pengelola Website Organisasi dan Tata Laksana	3 September 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
69	2018	Kepres No 135 Tahun 2018	Paw 2 Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran (Monev)	3 September 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
70	2018	Kepres No 136 Tahun 2018	Paw 4 Tim Penataan Tata Laksana (Business Process)	3 September 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
71	2018	Kepres No 139 Tahun 2018	Paw 2 Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Pegawai	3 September 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
72	2018	Kepres No 140 Tahun 2018	Paw 2 Tim Evaluator Internal SPBE	3 September 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
73	2018	Kepres No 141 Tahun 2018	Tim Penyusun SIPERJAKAT	3 September 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
74	2018	Kepres No 151 Tahun 2018	Tim Pelaksana Sistem Informasi Katalog Perpustakaan (SIKAP)	3 Oktober 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
75	2018	Kepres No 152 Tahun 2018	Tim Penyusunan Sistem Informasi RB (SIREBO)	3 Oktober 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
76	2018	Kepres No 154 Tahun 2018	Tim Penyusunan Optimalisasi Penataan Arsip Secara Terpadu	3 Oktober 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
77	2018	Kepres No 155 Tahun 2018	Pejabat Kuasa Pengguna Barang	3 Oktober 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepres no 5 tahun 2019
78	2018	Kepres No 172 Tahun 2018	Satgas SPIP	12 Desember 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepres no 12 tahun 2020
79	2018	Kepres No 179 Tahun 2018	Rencana Kerja Tahunan	31 Desember 2018	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
80	2019	Kepres KPA No 04 Tahun 2019	Tim Pengurus dan Penyimpanan BMN	7 Januari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
81	2019	Kepres KPA No 57 Tahun 2019	Perubahan Ketiga Atas Kepres KPA No 189 Tahun 2017 Ttg Tim Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	10 Juli 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepres no 08 tahun 2020
82	2019	Kepres No 05 Tahun 2019	Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Setjen Wantannas	7 Januari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepres no 38 tahun 2020

83	2019	Kepses No 06 Tahun 2019	Penetapan Calon Unit Kerja WBK	7 Januari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
84	2019	Kepses No 18 Tahun 2019	Tim Pengelola Website Ortala	31 Januari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 52 tahun 2019
85	2019	Kepses No 19 Tahun 2019	Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Barang Jasa Instansi Pemerintah	31 Januari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepses no 03 tahun 2020
86	2019	Kepses No 20 Tahun 2019	Tim P3PNS Tahun 2019	4 Februari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 71 tahun 2019
87	2019	Kepses No 23 Tahun 2019	Tim Pengelola Website	15 Februari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
88	2019	Kepses No 24 Tahun 2019	LPSE	15 Februari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku/Hanya berlaku 1 thn
89	2019	Kepses No 25 Tahun 2019	Tim Pengelola Website Sisfo Tahun 2019	15 Februari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 56 tahun 2019
90	2019	Kepses No 26 Tahun 2019	Tim Penyusunan Majalah dan Buletin	15 Februari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 73 tahun 2019
91	2019	Kepses No 27 Tahun 2019	Tim Pengelola Website Perencanaan	15 Februari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
92	2019	Kepses No 28 Tahun 2019	Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RB Tahun 2019	15 Februari 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 53 tahun 2019
93	2019	Kepses No 29 Tahun 2019	Tim Evaluator Internal	5 Maret 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 51 tahun 2019
94	2019	Kepses No 30 Tahun 2019	Penetapan Rencana Kerja ZI WBK WBBM	18 Maret 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
95	2019	Kepses No 32 Tahun 2019	Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Tim ZI	22 Maret 2019	√	<ul style="list-style-type: none"> • -
96	2019	Kepses No 37 Tahun 2019	Perubahan Atas Kep No 114 Tahun 2017 Ttg Pembentukan Tim UPG	5 April 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepses no 125 tahun 2020
97	2019	Kepses No 39 Tahun 2019	Tim Penilai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2019	29 April 2019	√	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepses no 49 tahun 2020

98	2019	Kepses No 49 Tahun 2019	Penetapan Status Penggunaan BMN yg Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan Selain Tanah dan Bangunan dengan Nilai Perolehan Lebih Kecil dan Atau Sampai dengan Seratus Juta Rupiah	28 Juni 2019	√	-
99	2019	Kepses No 50 Tahun 2019	Perubahan Kepses No 57 Tahun 2018 Ttg Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan	28 Juni 2019	√	<ul style="list-style-type: none"> • perlu diubah karena peserta dalam tim sudah ada yg pensiun
100	2019	Kepses No 51 Tahun 2019	Perubahan Atas Kepses No 29 Tahun 2019 Ttg Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	28 Juni 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
101	2019	Kepses No 52 Tahun 2019	Perubahan Atas Kepses No 18 Tahun 2019 Ttg Tim Pengelola Website Ortala	28 Juni 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
102	2019	Kepses No 53 Tahun 2019	Paw Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana RB Tahun 2019	28 Juni 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepses no 60 tahun 2019
103	2019	Kepses No 56 Tahun 2019	Perub Atas Kepses No 25 Tahun 2019 Ttg Tim Pengelola Website Tahun 2019	9 Juli 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku (diganti dengan kepses no 82 tahun 2019)
104	2019	Kepses No 58 Tahun 2019	Tim Penyusunan Renstra Ta 2020-2024	17 Juli 2019	√	<ul style="list-style-type: none"> • -
105	2019	Kepses No 59 Tahun 2019	PPID (Informasi dan Dokumentasi)	18 Juli 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepses no 11 tahun 2020
106	2019	Kepses No 60 Tahun 2019	Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana RBZI Tahun 2019	25 Juli 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diganti dengan kepses no 76 tahun 2019
107	2019	Kepses No 62 Tahun 2019	Panitia Penghapusan Barang Milik Negara 2019	16 Agustus 2019	√	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
108	2019	Kepses No 64 Tahun 2019	Perubahan Atas Kepsesjen No143 Tahun 2017 Tentang LHKPN	20 Agustus 2019	√	<ul style="list-style-type: none"> • -
109	2019	Kepses No 70 Tahun 2019	Tim Penyelesaian Kerugian Negara	27 September 2019	√	<ul style="list-style-type: none"> • -
110	2019	Kepses No 71 Tahun 2019	Perubahan Atas Kepses No 20 Tahun 2019 Ttg Tim P3PNS	2 Oktober 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
111	2019	Kepses No 73 Tahun 2019	Perubahan Atas Kepses No 26 Tahun 2019 Ttg Tim Penyusunan Majalah Dan Buletin	9 Oktober 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
112	2019	Kepses No 76 Tahun 2019	Tim RB Dan Zi Pusat	24 Oktober 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 28 tahun 2020
113	2019	Kepses No 81 Tahun 2019	Tim Penataan Tata Laksana (Bussiness Process)	4 November 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
114	2019	Kepses No 82 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Kepses No 25 Tahun 2019 Ttg Tim Pengelola Website Sisfo	4 November 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn

115	2019	Kepses No 83 Tahun 2019	Tim RB Dan ZI Kebiroan	4 November 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • hanya berlaku 1 thn
116	2019	Kepses No 84 Tahun 2019	Tim RB Dan ZI Sisnas	4 November 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 102 tahun 2020
117	2019	Kepses No 85 Tahun 2019	Tim RB Dan ZI Debang	4 November 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 103 tahun 2020
118	2019	Kepses No 86 Tahun 2019	Tim RB Dan ZI Polstra	4 November 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 30 tahun 2020
119	2019	Kepses No 87 Tahun 2019	Tim RB Dan ZI Jiandra	4 November 2019	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 29 tahun 2020
120	2019	Kepses No 90 Tahun 2019	Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Yang Nilai Perolehannya Di Atas 100 Jt	13 Desember 2019	√	• -
121	2019	Kepses No 91 Tahun 2019	Penghapusan BMN Berupa Aset Tak Berwujud Dibawah 100 Jt	16 Desember 2019	√	• -
122	2020	Kep KPA No 03 Tahun 2020	TIM PPBJ Dan PPHP	2 Januari 2020	X	• hanya berlaku 1 thn
123	2020	Kep KPA No 08 Tahun 2020	Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	15 Januari 2020	X	Sudah diubah dengan Kepses KPA No 15 Tahun 2020
124	2020	Kep KPA No 09 Tahun 2020	Tim Pengurus Dan Penyimpanan BMN	15 Januari 2020	X	• hanya berlaku 1 thn
125	2020	Kepses No 01 Tahun 2020	Penunjukan KPA 2020	2 Januari 2020	X	• hanya berlaku 1 thn
126	2020	Kepses No 03 Tahun 2020	SAKTI	3 Januari 2020	X	• hanya berlaku 1 thn
127	2020	Kepses No 04 Tahun 2020	PKPT	3 Januari 2020	X	• hanya berlaku 1 thn
128	2020	Kepses No 11 Tahun 2020	PPID	27 Januari 2020	X	• hanya berlaku 1 thn
129	2020	Kepses No 12 Tahun 2020	Satgas SPIP	27 Januari 2020	√	-
130	2020	Kepses No 13 Tahun 2020	Tim Pengelola Web Ortala 2020	30 Januari 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 107 tahun 2020
131	2020	Kepses No 14 Tahun 2020	Tim Pengelola Web Ren	30 Januari 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 107 tahun 2020
132	2020	Kepses No 28 Tahun 2020	PAW TIM RB Dan ZI PUSAT	13 Februari 2020	X	• hanya berlaku 1 thn
133	2020	Kepses No 29 Tahun 2020	PAW TIM RB Dan ZI JIANDRA	13 Februari 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 106 tahun 2020

134	2020	Kepses No 30 Tahun 2020	PAW TIM RB Dan ZI POLSTRA	13 Februari 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan kepses no 112 tahun 2020
135	2020	Kepses No 31 Tahun 2020	Penetapan Calon Unit Kerja ZI Menuju WBK TA 2020	20 Februari 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
136	2020	Kepses No 32 Tahun 2020	Panitia Pelaksanaan BMN Tahun 2020	15 Februari 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
137	2020	Kepses No 33 Tahun 2020	Penunjukan Agen Perubahan Pelaksanaan RB	25 Februari 2020	√	-
138	2020	Kepses No 37 Tahun 2020	Tim DKN	28 Februari 2020	X	Sudah tidak berlaku diubah dengan Kepses No 208 Tahun 2020
139	2020	Kepses No 38 Tahun 2020	Pejabat Kuasa Pengguna Barang (KPB)	28 Februari 2020	√	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
140	2020	Kepses No 49 Tahun 2020	Tim Penilai Internal ZI menuju WBK	9 Maret 2020	√	-
141	2020	Kepses No 52 Tahun 2020	Pembentukan Tim Asesor Penilai Mandiri RB	11 Maret 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah diubah dengan kepses no 158 tahun 2020
142	2020	Kepses No 56 Tahun 2020	LPSE 2020	17 Maret 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
143	2020	Kepses No 97 Tahun 2020	Tim Logam Tanah Jarang Setjen Wantannas	22 April 2020	X	-
144	2020	Kepses No 102 Tahun 2020	Paw Tim RB Desisnas	24 April 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
145	2020	Kepses No 103 Tahun 2020	Paw Tim RB Debang	24 April 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
146	2020	Kepses No 106 Tahun 2020	Paw Tim RB Dejiandra	27 April 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
147	2020	Kepses No 107 Tahun 2020	Tim Pengelola Website 2020	27 April 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
148	2020	Kepses No 112 Tahun 2020	Paw Kedua Tim RB Depolstra	29 April 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
149	2020	Kepses No 125 Tahun 2020	Tim Pembentukan UPG TA 2020	26 Mei 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
150	2020	Kepses KPA No 15 Tahun 2020	Perubahan Atas Kepses KPA No 8 Tahun 2020 tentang Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	29 Mei 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
151	2020	Kepses No 138 Tahun 2020	Tim Penyusunan Majalah 2020	8 Juni 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku, diubah dengan Kepses No 192 Tahun 2020
152	2020	Kepses No 156 Tahun 2020	Tim Penilai Internal PMPRB 2020	29 Juni 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
153	2020	Kepses No 157 Tahun 2020	Tim Unit WBS 2020	29 Juni 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
154	2020	Kepses No 158 Tahun 2020	PAW Tim Asesor PMPRB	29 Juni 2020	√	-
155	2020	Kepses No 170 Tahun 2020	PAW Gabungan Pengelola Website	31 Juli 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
156	2020	Kepses No 192 Tahun 2020	PAW Tim Penyusunan Majalah	19 Oktober 2020	√	-
157	2020	Kepses No 195 Tahun 2020	Penetapan Jabatan Lowong Pimpinan Tinggi Pratama	3 November 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
158	2020	Kepses No 197 Tahun 2020	Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pimpinan Tinggi Pratama	5 November 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn
159	2020	Kepses No 202 Tahun 2020	Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pimpinan Tinggi Pratama	9 November 2020	X	<ul style="list-style-type: none"> • hanya berlaku 1 thn

160	2020	Kepses No 208 Tahun 2020	Pembentukan Pokja Penyelesaian Transformasi Kelembagaan Wantannas Menjadi Wankamnas	13 November 2020	√	-
161	2021	Kep KPA No 05 Tahun 2021	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	20 Januari 2021	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan Kepses No 96 Tahun 2021
162	2021	Kepses No 01 Tahun 2021	Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi	4 Januari 2021	√	-
163	2021	Kepses No 04 Tahun 2021	Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Administrasi Umum APIP		√	-
164	2021	Kep KPA No 01 Tahun 2021	Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan Kep KPA No 07 Tahun 2021
165	2021	Kep KPA No 02 Tahun 2021	Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Barang/Jasa	21 Januari 2021	√	-
166	2021	Kep KPA No 03 Tahun 2021	Tim Pengurus dan Penyimpan BMN	21 Januari 2021	√	-
167	2021	Kepses No 08 Tahun 2021	Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	25 Januari 2021	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan Ke KPA No 13 Tahun 2021
168	2021	Kepses No 09 Tahun 2021	Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	25 Januari 2021	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan Kepses No 113 Tahun 2021
169	2021	Kepses No 14 Tahun 2021	Tim Pengelola Website Organisasi dan Tata Laksana	16 Februari 2021	√	-
170	2021	Kepses No 15 Tahun 2021	Tim Pengelola Website Perencanaan	16 Februari 2021	√	-
171	2021	Kepses No 16 Tahun 2021	Tim Pengelola Website	16 Februari 2021	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan Kepses No 115 Tahun 2021
172	2021	Kepses No 19 Tahun 2021	Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	18 Februari 2021	√	-
173	2021	Kepses No 27 Tahun 2021	Tim Pengarah dan Pelaksana RBZI Pusat	4 Maret 2021	√	-
174	2021	Kepses No 28 Tahun 2021	Tim Pelaksana RBZI Deputi Pengembangan	4 Maret 2021	√	-
175	2021	Kepses No 29 Tahun 2021	Penetapan Pejabat KPB	4 Maret 2021	√	-
176	2021	Kepses No 30 Tahun 2021	Tim Pelaksana RBZI Deputi Polstra	4 Maret 2021	X	<ul style="list-style-type: none"> • sudah tidak berlaku • sudah diubah dengan Kepses No 127 Tahun 2021
177	2021	Kepses No 31 Tahun 2021	Tim Pelaksana RBZI Deputi Jiandra	4 Maret 2021	√	-
178	2021	Kepses No 32 Tahun 2021	Tim Pelaksana RBZI Deputi Sisnas	29 Maret 2021	√	-
179	2021	Kepses No 46 Tahun 2021	Program Pembentukan Peraturan Sekretariat Jenderal DKN	23 Maret 2021	√	-
180	2021	Kepses No 50 Tahun 2021	Tim Koordinasi Pengelolaan SIPPN	29 Maret 2021	√	-

181	2021	Kepses No 51 Tahun 2021	Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	29 Maret 2021	√	-
182	2021	Kep KPA No 07 Tahun 2021	Perubahan atas Kep KPA No 01 Tahun 2021 tentang Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1 April 2021	√	-
183	2021	Kep KPA No 08 Tahun 2021	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah	1 April 2021	√	-
184	2021	Kepses No 70 Tahun 2021	Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB	19 April 2021	√	-
185	2021	Kepses No 71 Tahun 2021	Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	20 April 2021	√	-
186	2021	Kepses No 60 Tahun 2021	Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	5 April 2021	√	-
187	2021	Kepses No 82 Tahun 2021	Tim Koordinasi SPBE	5 Mei 2021	√	-
188	2021	Kep KPA No 13 Tahun 2021	Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan	10 Mei 2021	√	-
189	2021	Kepses No 96 Tahun 2021	Penetapan Pejabat KPA	7 Juni 2021	√	-
190	2021	Kepses No 104 Tahun 2021	Satgas P4GN	19 Juli 2021	√	-
191	2021	Kepses No 108 Tahun 2021	Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal	27 Juli 2021	√	-
192	2021	Kepses No 109 Tahun 2021	Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	28 Juli 2021	√	-
193	2021	Kepses No 113 Tahun 2021	Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 09 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	12 Agustus 2021	√	-
194	2021	Kepses No 115 Tahun 2021	Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Website	12 Agustus 2021	√	-
195	2021	Kepses No 117 Tahun 2021	Tim Panitia Penilai Pemusnahan Arsip	18 Agustus 2021	√	-
196	2021	Kepses No 119 Tahun 2021	Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	20 Agustus 2021	√	-
197	2021	Kepses No 122 Tahun 2021	Panitia Pelaksana Penghapusan dan Penjualan BMN	26 Agustus 2021	√	-
198	2021	Kepses No 127 Tahun 2021	Tim Pelaksana RB di Lingkungan Kedeputusan Polstra	9 September 2021	√	-

